

PENELITIAN **MANDIRI**



ANALISIS

**PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN**

KESENJANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

DI
KAWASAN **JATINANGOR**



PENELITI

PUTRI WULANDARI

2014

ANALISIS KESENJANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI KAWASAN JATINANGOR

Penanggung Jawab :

Kepala PKP2A I Lembaga Administrasi Negara

Penulis :

Putri Wulandari



Diterbitkan Oleh :

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

BANDUNG

2014

Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Kawasan Jatinangor

Penulis : Putri W.
Desain Sampul : Budi Permana
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Cetakan I, 2014

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, Termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Hak Penerbitan pada:
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Alamat : Jl. Kiara Payung km. 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat
Tel/Fax : (022) 7790044 – 7790055
E-mail : admin@litbang-lan-bdg.info
info@bandung.lan.go.id
Web : www.litbang-lan-bdg.info
www.bandung.lan.go.id

ISBN : 978-979-3382-87-6

Penulis :
1. Putri W.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029, Jatinangor ditetapkan sebagai pusat pendidikan tinggi Kawasan Strategis Provinsi (KSP). KSP sendiri merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi. Dengan adanya amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029 tersebut, Jatinangor menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan pembangunannya.

Sebagai pusat pendidikan, kawasan Jatinangor dilengkapi dengan sarana-sarana pendidikan. Terdapat empat perguruan tinggi ternama di kawasan ini, yaitu Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu untuk memfasilitasi pendidikan dasar bagi masyarakat di sekitar Jatinangor, di kawasan ini terdapat 17 Taman Kanak-Kanak, 29 Sekolah Dasar (SD), 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 4 Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, di kawasan Jatinangor terdapat 5 Madrasah Ibtidaiyah dan 4 Madrasah Tsanawiyah¹.

Sebagai salah satu kecamatan yang ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Kecamatan Jatinagor merupakan kawasan yang sangat cepat pertumbuhan dan perkembangannya. Dibandingkan

¹ Kecamatan Jatinangor Dalam Angka Tahun 2013

dengan seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang, Jatinangor menempati urutan ketiga sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak. Persentase jumlah penduduk di kecamatan ini dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang pada tahun 2011 sebesar 9,99% dan pada tahun 2012 mencapai 10,12%. Pada tahun 2011, jumlah penduduk di kecamatan ini sebesar 86.597 orang. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,43%, jumlah penduduk Kecamatan Jatinangor pada tahun 2012 tumbuh hingga mencapai 98.035 orang.

Sementara itu, apabila dilihat dari pertumbuhan ekonominya, yang dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jatinangor merupakan kecamatan dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Sumedang. Data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa selama lima tahun (2008 – 2012) PDRB kecamatan Jatinangor lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang.

Kemudian apabila melihat struktur perekonomian Kecamatan Jatinangor, pada kurun waktu 2008 – 2012 tidak banyak mengalami perubahan. Selama lima tahun periode penelitian, perekonomian Jatinangor didominasi oleh sektor industri pengolahan. Kontribusi terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan rata-rata *share* sebesar 23.30, sektor ini menempati posisi kedua dalam perekonomian Jatinangor. Disusul oleh sektor pertanian dan jasa-jasa yang menempati posisi ketiga dan keempat dalam perekonomian Jatinangor.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Dilihat dari jumlah PDRB di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang pada periode 2008 - 2012, dengan menggunakan Tipologi Klassen, diketahui bahwa Jatinangor merupakan satu dari enam kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Jatinangor. Sementara itu, terdapat 17 kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah di Kabupaten Sumedang. Kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi yang paling rendah di Kabupaten Sumedang adalah Kecamatan Surian. Meskipun

Indeks Williamson di Kabupaten Sumedang hanya sebesar 0,39, akan tetapi pendapatan daerah Kecamatan Jatinangor mencapai 21 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan daerah Kecamatan Surian pada tahun 2012.

Dengan membagi jenis lapangan usaha DI Kecamatan Jatinangor ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, diperoleh bahwa pendapatan per kapita di sektor primer adalah sebesar Rp 15.311.319,01 per tahun, pendapatan per kapita di sektor sekunder adalah sebesar Rp 27.830.624,39 per tahun, dan pendapatan per kapita di sektor tersier adalah sebesar Rp 12.058.892,85 per tahun. Besarnya kesenjangan yang terjadi antar sektor yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi dengan sektor yang memiliki pendapatan per kapita terendah di Kecamatan Jatinangor adalah sebesar Rp 15.771.731,54 per tahun atau sebesar Rp 1.314.310,96 per bulan.

Dengan membagi penduduk di Kecamatan Jatinangor ke dalam kelompok sejahtera dan kelompok pra sejahtera, rata-rata pendapatan penduduk yang berada di kelompok sejahtera sebesar Rp 22.263.223,00 per tahun (Rp 1.855.268,57 per bulan) dan rata-rata pendapatan penduduk yang berada di kelompok pra sejahtera sebesar Rp 2.891.340,00 per tahun (Rp 240.945,00 per bulan). Besarnya kesenjangan pendapatan yang terjadi antar individu, yaitu antara kelompok penduduk pra sejahtera dan kelompok penduduk sejahtera di Kecamatan Jatinangor adalah sebesar Rp 19.371.882,89 per tahun atau sebesar Rp 1.614.323,57 per bulan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Apabila pertumbuhan ekonomi terjadi secara merata di Kabupaten Sumedang, maka tidak akan ada lagi kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Demikian pula tidak akan ada lagi sektor lapangan usaha yang lebih unggul dibandingkan sektor lainnya. Pada akhirnya tidak akan ditemui lagi penduduk yang masuk dalam kategori pra sejahtera (miskin). Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang ada, baik antara Kecamatan Jatinangor dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sumedang, ataupun antar sektor lapangan usaha dan antar individu di Kecamatan

Jatinangor, untuk itu peran aktif dari Pemerintah Kabupaten Sumedang sangat dibutuhkan.

Kesenjangan yang terjadi antara sektor dan antar individu di Kecamatan Jatinangor dapat diperkecil/dipersempit melalui keberpihakan Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada kelompok-kelompok yang rentan akan kemiskinan, yaitu penduduk pada sektor primer dan sektor tersier. Keberpihakan tersebut dapat dilakukan dengan cara membatasi penguasaan asset dan ijin berusaha bagi penduduk di luar Jatinangor.

Selain itu, agar pendapatan per kapita penduduk Kecamatan Jatinangor di sector pimer dan tersier meningkat, Pemerintah Kabupaten Sumedang pun harus lebih memberdayakan penduduk asli Kecamatan Jatinangor, misalnya dengan memberikan pelatihan dan keterampilan kerja, serta program pemagangan di perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Sumedang.

Kesenjangan pendapatan antar sektor di Kecamatan Jatinangor yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari selisih antara pendapatan penduduk di sektor yang tertinggi dengan sektor yang terendah, dalam penelitian ini yaitu antara sektor sekunder dengan sektor tersier. Namun, dikarenakan jumlah penduduk pada setiap sektor yang digunakan menggunakan asumsi bahwa setiap tenaga kerja di setiap sektor mempunyai tanggungan yang sama, maka kesenjangan antar sektor yang terjadi belum mencerminkan kesenjangan antar sektor yang sebenarnya. Untuk mendapatkan angka kesenjangan pendapatan antar sektor yang sebenarnya (riil), harus dilakukan survey terhadap lapangan usaha seluruh penduduk di Kecamatan Jatinangor.

Angka kesenjangan pendapatan antar individu di Kecamatan Jatinangor yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari selisih antara pendapatan penduduk sejahtera dengan pendapatan penduduk pra sejahtera yang diperoleh dari masing-masing PDRB nya. Untuk mendapatkan angka ketimpangan pendapatan yang sebenarnya (riil), harus dilakukan survey terhadap pendapatan seluruh penduduk di Kecamatan Jatinangor.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur teramat dalam kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penelitian yang berjudul *Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Kawasan Jatinangor* ini dapat selesai sesuai harapan. Terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. *Pertama* untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi di Kecamatan Jatinangor dengan daerah lainnya di Kabupaten Sumedang, *kedua* untuk *menganalisis* kesenjangan yang terjadi antar sektor dalam PDRB di Kecamatan Jatinangor, dan *ketiga* untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara penduduk di Kecamatan Jatinangor.

Apabila pertumbuhan ekonomi terjadi secara merata di seluruh daerah, Kabupaten Sumedang khususnya, maka tidak akan ada lagi kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Demikian pula, apabila dilihat melalui jenis lapangan usaha, tidak akan ada lagi sektor lapangan usaha yang lebih unggul dibandingkan sektor lainnya. Pada akhirnya tidak akan ditemui lagi penduduk yang masuk dalam kategori pra sejahtera (miskin). Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang ada, peran aktif dari Pemerintah sangat dibutuhkan. Melalui penelitian mandiri ini, kami mencoba untuk menganalisis tingkat kesenjangan yang terjadi di Kawasan Jatinangor.

Pada kesempatan ini kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Joni Dawud, DEA. selaku Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara,

Bapak Dr. H. Baban Sobandi, SE., M.Si. selaku Kepala Bidang Litbang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, Bapak Sajidin selaku Narasumber dari Bappeda Kabupaten Sumedang, Saudara Rosita Novi Andari selaku koordinator kegiatan dan semua pihak yang telah memfasilitasi dan turut serta membantu dari awal hingga selesainya kajian ini.

Kami menyadari bahwa hasil kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami sangat mengharapkan kritik maupun saran guna perbaikan kajian ini. Akhirnya, semoga hasil kajian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan banyak manfaat bagi para pembacanya.

Sumedang, Desember 2014

Penulis



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF		i
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
DAFTAR TABEL		ix
DAFTAR GAMBAR		xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Permasalahan	5
	C. Tujuan dan Sasaran Penelitian	6
	D. Output Penelitian	6
	E. Manfaat Hasil Penelitian	6
	F. Sistematika Pelaporan	7
BAB II	TINJAUAN TEORITIS DESENTRALISASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	9
	A. Konsep Pendapatan dan Distribusi Pendapatan	9
	B. Kesenjangan Ekonomi serta Faktor Penyebabnya	16
	C. Kerangka Pemikiran	20
BAB II	METODE PENELITIAN	21
	A. Objek Penelitian	21
	B. Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan	22

	Data	
	C. Metode Analisis	23
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	27
	A. Profil Kawasan Jatinangor Kabupaten Sumedang	27
	B. Analisis Kesenjangan Antara Kecamatan Jatinangor dengan Kecamatan Lainnya di Kabupaten Sumedang	30
	C. Analisis Kesenjangan Antar Sektor Lapangan Usaha di Kecamatan Jatinangor	36
	D. Analisis Kesenjangan Antar Individu di Kecamatan Jatinangor	42
BAB V	PENUTUP	45
	A. Kesimpulan	45
	B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 – 2012 (Jiwa)	3
Tabel 1.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 – 2012 (Juta Rupiah)	4
Tabel 2.1	Sektor dan Sub Sektor pada Struktur Produk Domestik Regional Bruto	10
Tabel 3.1	Data dan Sumber Data yang Digunakan	22
Tabel 3.2	Kategori Sektor Berdasarkan Tipologi Klassen	24
Tabel 3.3	Kategori Indeks Williamson	25
Tabel 4.1	Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Jatinangor Tahun 2008 – 2012	29
Tabel 4.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Berdasarkan Sektor Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Jatinangor Tahun 2008 – 2012 (Juta Rupiah)	37
Tabel 4.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 (ADHK) Berdasarkan Sektor Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Jatinangor Tahun 2008 – 2012 (Juta Rupiah)	37
Tabel 4.4	Distribusi PDRB Kecamatan Jatinangor Menurut Sektor Lapangan Usaha Berdasarkan ADHB dan ADHK Tahun 2008 – 2012	38
Tabel 4.5	Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Jatinangor	39

	Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2012	
Tabel 4.6	Proporsi Tenaga Kerja di Kecamatan Jatinangor Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Tahun 2012	40
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk dan Pendapatan per Kapita di Kecamatan Jatinangor Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Tahun 2012	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Empat Tipologi Daerah	13
Gambar 2.2	Kerangka Pikir Kajian	20
Gambar 4.1	Perbandingan Luas Wilayah dan Kontribusi Kecamatan Jatinangor dengan 25 Kecamatan Lainnya di Kabupaten Sumedang	32
Gambar 4.2	Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi per Kecamatan di Kabupaten Sumedang Periode 2008 - 2012	33
Gambar 4.3	Tipologi Kecamatan di Kabupaten Sumedang Periode 2008 - 2012	35
Gambar 4.4	Rata-rata Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Jatinangor Tahun 2008 - 2012	36
Gambar 4.5	Pendapatan per Kapita Penduduk di Kecamatan Jatinangor (Rupiah/Tahun)	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029, Jatinangor ditetapkan sebagai pusat pendidikan tinggi Kawasan Strategis Provinsi (KSP). KSP sendiri merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi. Dengan adanya amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029 tersebut, Jatinangor menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan pembangunannya.

Sebagai pusat pendidikan, kawasan Jatinangor dilengkapi dengan sarana-sarana pendidikan. Terdapat empat perguruan tinggi ternama di kawasan ini, yaitu Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu untuk memfasilitasi pendidikan dasar bagi masyarakat di sekitar Jatinangor, di kawasan ini terdapat 17 Taman Kanak-Kanak, 29 Sekolah Dasar (SD), 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP)

dan 4 Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, di kawasan Jatinangor terdapat 5 Madrasah Ibtidaiyah dan 4 Madrasah Tsanawiyah¹.

Sebagai salah satu kecamatan yang ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Kecamatan Jatinangor merupakan kawasan yang sangat cepat pertumbuhan dan perkembangannya. Dibandingkan dengan seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang, Jatinangor menempati urutan ketiga sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak. Persentase jumlah penduduk di kecamatan ini dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang pada tahun 2011 sebesar 9,99% dan pada tahun 2012 mencapai 10,12%. Pada tahun 2011, jumlah penduduk di kecamatan ini sebesar 86.597 orang. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,43%, jumlah penduduk Kecamatan Jatinangor pada tahun 2012 tumbuh hingga mencapai 98.035 orang.

Sementara itu, apabila dilihat dari pertumbuhan ekonominya, yang dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jatinangor merupakan kecamatan dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Sumedang. Data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa selama lima tahun (2008 – 2012) PDRB kecamatan Jatinangor lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang.

Tabel 1.1 dan Tabell 1.2 berikut ini menunjukkan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang.

¹ Kecamatan Jatinangor Dalam Angka Tahun 2013

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 – 2012 (Jiwa)

No.	Kecamatan	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk
1.	Jatinangor	86.370	86.460	82.362	86.597	98.035	3,43
2.	Cimanggung	78.488	83.478	98.904	103.825	107.760	8,40
3.	Tanjungsari	75.379	76.785	76.229	78.485	85.663	3,31
4.	Rancakalong	41.130	41.668	41.962	42.793	44.673	2,10
5.	Sumedang Selatan	78.541	81.042	77.253	80.935	92.529	4,40
6.	Sumedang Utara	86.204	86.732	89.821	91.872	101.533	4,24
7.	Situraja	38.037	39.342	40.025	41.161	43.631	3,50
8.	Darmaraja	43.134	42.643	42.093	43.082	45.106	1,15
9.	Wado	49.303	50.974	51.647	52.639	55.966	3,24
10.	Jatigede	26.154	26.739	26.750	27.287	27.368	1,15
11.	Tomo	24.607	25.233	25.952	26.012	27.035	2,39
12.	Ujungjaya	32.120	33.043	32.706	33.672	36.250	3,12
13.	Conggeang	30.210	31.222	30.893	31.570	33.205	2,42
14.	Paseh	36.219	37.361	38.322	38.622	40.500	2,84
15.	Cimalaka	58.336	59.596	60.536	62.820	67.312	3,67
16.	Tanjungkerta	35.367	35.886	36.564	37.710	39.122	2,56
17.	Buahdua	35.162	35.579	34.767	35.721	37.069	1,36
18.	Cibugel	23.602	24.121	24.152	24.624	26.066	2,53
19.	Tanjungmedar	27.149	27.519	26.574	27.045	28.494	1,26
20.	Cisitu	28.489	29.167	29.171	29.659	30.798	1,98
21.	Pamulihan	55.936	57.275	60.682	62.319	67.826	4,97
22.	Ganeas	24.525	24.809	25.914	26.183	27.097	2,54
23.	Jatinunggal	46.216	45.941	42.996	43.140	46.539	0,30
24.	Sukasari	33.126	35.021	36.226	37.196	38.478	3,82
25.	Cisarua	21.346	22.243	21.426	21.785	22.426	1,29
26.	Surian	12.167	12.040	11.877	12.083	12.507	0,71

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Sumedang 2013

Tabel 1.2

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 – 2012 (Juta Rupiah)

No.	Kecamatan	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jatinangor	1.203.894,75	1.312.435,03	1.447.142,35	1.597.005,68	1.769.334,05
2.	Cimanggung	1.048.059,33	1.136.385,38	1.242.403,63	1.359.599,97	1.492.447,36
3.	Tanjungsari	586.699,10	640.006,76	707.053,28	785.350,61	872.103,55
4.	Rancakalong	297.227,71	322.183,86	351.698,01	387.140,77	424.799,47
5.	Sumedang Selatan	813.647,24	885.683,57	977.767,87	1.085.904,84	1.208.745,67
6.	Sumedang Utara	1.148.785,51	1.253.696,35	1.396.375,62	1.559.061,40	1.747.834,39
7.	Situraja	427.792,12	464.287,46	506.493,63	558.768,62	613.985,68
8.	Darmaraja	369.351,47	400.041,92	435.723,80	479.278,38	525.222,06
9.	Wado	409.550,82	442.920,08	485.125,64	535.069,07	588.268,48
10.	Jatigede	180.893,07	195.182,88	212.074,67	232.829,79	254.073,80
11.	Tomo	277.860,46	301.373,33	328.128,85	360.441,87	394.351,47
12.	Ujungjaya	337.384,73	367.052,55	398.457,73	438.901,40	479.906,11
13.	Conggeang	359.413,54	390.176,93	426.464,18	470.427,85	516.866,79
14.	Paseh	328.174,60	357.142,60	389.719,05	428.469,12	470.689,18
15.	Cimalaka	535.753,62	581.250,53	636.663,90	701.716,17	772.982,85
16.	Tanjungkerta	329.589,07	356.353,90	387.429,41	425.338,12	465.903,86
17.	Buahdua	444.008,98	482.999,69	527.056,22	582.894,06	639.728,34
18.	Cibugel	163.989,25	177.339,72	192.564,14	211.721,37	230.949,69
19.	Tanjungmedar	99.815,73	107.541,99	116.340,31	126.565,84	137.557,95
20.	Cisitu	154.825,83	167.076,71	181.264,06	198.436,84	216.860,60
21.	Pamulihan	208.981,57	226.788,26	246.779,05	270.499,28	296.733,26
22.	Ganeas	115.916,14	124.760,99	135.781,67	148.692,32	162.695,70
23.	Jatinunggal	153.771,88	165.867,97	179.929,40	196.987,97	215.064,58
24.	Sukasari	125.410,12	135.196,19	146.638,39	160.332,80	175.124,05
25.	Cisarua	118.991,64	128.522,61	139.690,44	153.071,49	167.783,89
26.	Surian	61.154,18	65.900,30	70.918,20	77.272,61	83.705,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, 2013

Ket: * angka sementara

** angka sangat sementara

Kemudian apabila melihat struktur perekonomian Kecamatan Jatinangor, pada kurun waktu 2008 – 2012 tidak banyak mengalami perubahan. Selama lima tahun periode penelitian, perekonomian Jatinangor didominasi oleh sektor industri pengolahan. Kontribusi terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan rata-rata *share* sebesar 23.30, sektor ini menempati posisi kedua dalam perekonomian Jatinangor. Disusul oleh sektor pertanian dan jasa-jasa yang menempati posisi ketiga dan keempat dalam perekonomian Jatinangor.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa antara Kecamatan Jatinangor dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang memiliki perbedaan dalam hal pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonominya. Demikian pula di Kecamatan Jatinangor sendiri, pertumbuhan ekonomi yang terjadi berasal dari salah satu sektor lapangan usaha utama. Oleh karena itu untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan yang terjadi di antar kecamatan di Kabupaten Sumedang, dan kesenjangan antar sektor lapangan usaha dan antar individu di Kecamatan Jatinangor, pada tahun 2014 ini, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara melakukan Penelitian Mandiri dengan judul *Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Kawasan Jatinangor*.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana kesenjangan ekonomi di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?”. Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesenjangan yang terjadi antara Kecamatan Jatinangor dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang?

2. Bagaimana kesenjangan yang terjadi antar sektor di Kecamatan Jatinangor?
3. Bagaimana kesenjangan yang terjadi antara individu di Kecamatan Jatinangor?

C. TUJUAN DAN SASARAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melakukan pembangunan ekonomi kawasan Jatinangor. Adapun sasaran dari penelitian ini adalah

1. Teridentifikasinya kesenjangan yang terjadi antara Kecamatan Jatinangor dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang.
2. Teridentifikasinya kesenjangan yang terjadi antar sektor di Kecamatan Jatinangor.
3. Teridentifikasinya kesenjangan yang terjadi antar individu di Kecamatan Jatinangor.

D. OUTPUT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi mengenai langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sumedang dalam melakukan pembangunan ekonomi di Kecamatan Jatinangor khususnya yang berkaitan dengan upaya mengantisipasi dampak kesenjangan ekonomi di Kecamatan Jatinangor.

E. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan ataupun acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatinangor pada khususnya, dan di Kabupaten Sumedang pada umumnya.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Selanjutnya, sistematika pelaporan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang melatarbelakangi munculnya permasalahan penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran penelitian, output penelitian, manfaat hasil penelitian dan sistematika pelaporan.

BAB II : Tinjauan Teoritis Pembangunan Ekonomi Daerah

Bab ini menjelaskan tentang berbagai kerangka teori yang digunakan, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu meliputi objek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, sumber data dan metode analisis.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum (profil) Kecamatan Jatinangor, kesenjangan yang terjadi antara Kawasan Jatinangor dengan daerah lainnya di Kabupaten Sumedang, kesenjangan yang terjadi antar sektor dalam PDRB di Kecamatan Jatinangor, serta kesenjangan yang terjadi antara penduduk di Kecamatan Jatinangor.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis derajat kesenjangan dalam pembangunan ekonomi daerah. Bab ini menjelaskan indikator tersebut diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kabupaten/kota atau distribusi PDRB kabupaten/kota dalam pembentukan PDRB provinsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan.

A. KONSEP PENDAPATAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan dalam pembangunan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB dapat dihasilkan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), dan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). Pendekatan produksi yaitu PDRB merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah (*region*) pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun. Pendekatan pendapatan yaitu PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa

tanah, bunga modal dan keuntungan. Dalam pengertian PDRB termasuk pula penyusutan barang modal tetap dan pajak tidak langsung neto. Jumlah komponen pendapatan ini per-sektor disebut sebagai nilai tambah bruto seluruh sector (lapangan usaha). Pendapatan pengeluaran yaitu PDRB merupakan jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, perubahan stok dan ekspor neto di suatu wilayah pada suatu periode (biasanya setahun). Ekspor neto disini adalah ekspor dikurangi impor.

Terdapat sembilan sektor untuk menentukan nilai PDRB suatu daerah, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi (bangunan), sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa. Masing-masing sektor tersebut kemudian dirinci menjadi subsektor seperti tertera pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2.1

Sektor dan Sub Sektor pada Struktur Produk Domestik Regional Bruto

No.	Sektor	Sub Sektor
1.	Sektor Pertanian	1) Tanaman Bahan Makanan 2) Tanaman Perkebunan 3) Peternakan dan hasil-hasilnya 4) Kehutanan 5) Perikanan
2.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	1) Minyak dan Gas Bumi 2) Pertambangan tanpa Migas 3) Penggalian
3.	Sektor Industri Pengolahan	1) Industri Migas: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengilangan Minyak ➢ Gas Alam Cair 2) Industri Tanpa Migas: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Makanan, Minuman, dan Tembakau ➢ Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki ➢ Barang Kayu dan Barang Hutan Lainnya

No.	Sektor	Sub Sektor
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kertas dan Barang Cetak ➤ Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karpet ➤ Semen dan Barang Galian Bukan Logam ➤ Logam Dasar Besi dan Baja ➤ Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya ➤ Barang Lainnya
4.	Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1) Listrik 2) Gas 3) Air Bersih
5.	Sektor Konstruksi (Bangunan)	
6.	Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan Besar dan Eceran 2) Hotel 3) Restoran
7.	Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengangkutan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Angkutan Rel ➤ Angkutan Jalan Raya ➤ Angkutan Laut ➤ Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ➤ Angkutan Udara ➤ Jasa Penunjang Angkutan 2) Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pos dan Telekomunikasi ➤ Jasa Penunjang Komunikasi
8.	Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bank 2) Lembaga Keuangan tanpa Bank 3) Jasa Penunjang Keuangan 4) Sewa Bangunan 5) Jasa Perusahaan
9.	Sektor Jasa-jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintahan Umum <ul style="list-style-type: none"> ➤ Administrasi Pemerintahan, dan Pertahanan ➤ Jasa Pemerintah Lainnya 2) Swasta <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosial Kemasyarakatan ➤ Hiburan dan Rekreasi ➤ Perorangan dan Rumah Tangga

Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah dapat juga dilihat dari perbedaan peranan sektoral dalam pembentukan PDRB. Secara hipotesis dapat dirumuskan bahwa semakin besar peran dari sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti industri manufaktur terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di suatu wilayah, semakin tinggi pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut.

Sektor-sektor ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni primer, sekunder dan tersier. Yang termasuk sektor-sektor primer adalah pertanian dan pertambangan (termasuk penggalan); sekunder adalah industri manufaktur, listrik, gas, dan air bersih, serta bangunan; dan tersier adalah sektor-sektor lainnya. Diukur dengan nilai tambah, sektor-sektor sekunder adalah sektor-sektor dengan nilai tambah terbesar, khususnya karena kontribusi dari industri manufaktur, sedangkan terendah adalah sektor-sektor primer.

Di samping itu, distribusi pendapatan menurut wilayah atau provinsi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur derajat penyebaran dari hasil pembangunan ekonomi di suatu negara. PDRB yang relatif sama antarprovinsi memberi suatu indikasi bahwa distribusi PDB nasional relatif merata antarprovinsi. Hal ini menunjukkan kesenjangan ekonomi antarprovinsi relatif kecil. Atau dapat dikatakan bahwa semakin besar perbedaan dalam pangsa PDB nasional antarprovinsi, semakin besar kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antarprovinsi.

Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, distribusi PDRB provinsi menurut kabupaten/kota menjadi salah satu indikator dalam mengukur derajat penyebaran hasil pembangunan ekonomi di suatu provinsi. PDRB yang relatif sama antar kabupaten/kota memberi suatu indikasi bahwa distribusi PDRB provinsi relatif merata antar kabupaten/kota. Hal ini berarti kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota relatif kecil. Dapat dikatakan pula bahwa semakin besar perbedaan dalam pangsa PDRB provinsi antar

kabupaten/kota, semakin besar kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini umumnya diukur dengan pendapatan rata-rata perkapita. Distribusi PDB nasional menurut provinsi menjadi indikator yang tidak berarti dalam mengukur kesenjangan dalam pembangunan ekonomi regional jika tidak dikombinasikan dengan tingkat PDRB rata-rata per kapita.

Provinsi-provinsi di Indonesia (atau di negara manapun) dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Kelompok *pertama* adalah provinsi dengan PDRB per kapita rendah, namun tingkat pertumbuhannya tinggi. Kelompok *kedua* adalah provinsi dengan PDRB per kapita dan pertumbuhannya tinggi. Kelompok *ketiga* adalah provinsi dengan PDRB per kapita tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya rendah. Kelompok *keempat* adalah provinsi dengan PDRB per kapita dan pertumbuhan rendah. Pengelompokan yang sama berlaku juga untuk daerah kabupaten/kota.

PDRB PER KAPITA			
Tinggi	KELOMPOK III PDRB per kapita tinggi Pertumbuhannya rendah	KELOMPOK II PDRB per kapita tinggi Pertumbuhannya tinggi	
	KELOMPOK IV PDRB per kapita rendah Pertumbuhan rendah	KELOMPOK I PDRB per kapita rendah Pertumbuhannya tinggi	
Rendah		Rendah	Tinggi
		PERTUMBUHAN	

Gambar 2.1
Empat Tipologi Daerah

Selain PDRB per kapita dan pertumbuhannya, untuk mengukur kesenjangan antar daerah (baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota) dapat digunakan indeks Williamson yang disebut *Weighted Coefficient of Variation (WCV)*.

Nilai indeks Williamson ini antara 0 dan 1. Apabila mendekati 0 berarti distribusi PDRB menurut kabupaten/kota sangat merata (atau variasi PDRB per kapita antar kabupaten/kota sangat kecil), dan sebaliknya bila mendekati 1 berarti tingkat disparitas (kesenjangan) sangat tinggi.

Berbicara mengenai disparitas, Williamson (dalam Tambunan, 2003) menemukan bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi, disparitas dalam distribusi pendapatan akan membesar dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang pada awalnya sudah relatif maju, misalnya dalam pembangunan industri, infrastruktur dan SDM. Kemudian pada tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, terjadi konvergensi dan kesenjangan dalam distribusi pendapatan akan mengalami penurunan.

Penemuan Williamson ini sesuai dengan hipotesis dari Kuznets yang dikenal dengan hipotesis U terbalik, yakni pada tahap awal dari suatu proses pembangunan ekonomi nasional, perbedaan dalam laju pertumbuhan regional yang besar antarprovinsi (atau antar kabupaten/kota) mengakibatkan kesenjangan dalam distribusi pendapatan antarprovinsi. Akan tetapi pada jangka panjang, pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan (*maturity*) dan dengan asumsi mekanisme pasar bebas serta mobilitas semua faktor-faktor produksi antarprovinsi tanpa sedikitpun rintangan, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan *output* antarprovinsi cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat pendapatan per kapita dan laju pertumbuhannya) rata-rata yang semakin tinggi di setiap provinsi, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan ekonomi regional.

Pembangunan suatu wilayah (pembangunan regional) berkorelasi sangat kuat dengan apa yang disebut tingkat pendapatan masyarakat.

Dikatakan demikian karena tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur adanya pembangunan wilayah. Tarigan (2004: 13) menyatakan bahwa terdapat dua cara untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat di suatu wilayah, pertama dari total pendapatan wilayah, dan kedua dari pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Tingkat pendapatan masyarakat ini dikenal pula dengan istilah pendapatan regional.

Pembangunan wilayah semestinya berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut, yaitu pendapatan rata-rata masyarakat (*income per capita*). Kekeliruan yang sering terjadi adalah menganggap bahwa besarnya nilai produksi suatu wilayah adalah identik dengan besarnya pendapatan masyarakat di wilayah itu. Hal ini keliru karena yang menjadi pendapatan untuk masyarakat setempat hanyalah yang bersifat nilai tambah dari kegiatan produksi tersebut. Nilai tambah inilah yang mengukur tingkat kemakmuran masyarakat setempat tentunya dengan asumsi bahwa seluruh pendapatan itu dinikmati masyarakat setempat.

Pada umumnya terdapat enam item yang termasuk dalam nilai tambah suatu kegiatan produksi barang/jasa, yakni (1) gaji/upah, (2) laba, (3) sewa tanah, (4) bunga uang yang dibayarkan, (5) penyusutan, serta (6) pajak tidak langsung. Keenam item nilai tambha tersebut *Pertama*, upah dan gaji adalah pendapatan bagi para pekerja. Upah merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan prestasi, sedangkan gaji merupakan balas jasa yang nilainya tetap untuk periode tertentu. *Kedua*, laba atau keuntungan adalah total nilai penjualan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Laba merupakan pendapatan bagi pengusaha.

Ketiga, sewa tanah diperhitungkan karena memberikan pendapatan bagi pemilik tanah. Apabila petani memiliki lahan sendiri, berarti dia tidak mengeluarkan biaya sewa tetapi labanya akan meningkat. Perlu diingat bahwa sewa tanah yang dihitung adalah yang dibayarkan, sedangkan sewa

tanah yang diterima karena menyewakan tanah, nilai tambahnya akan terlihat pada laba. *Keempat*, bunga uang merupakan pendapatan bagi pemilik modal karena meminjamkan uangnya untuk ikut serta dalam proses produksi. Bunga yang dihitung sebagai nilai tambah adalah bunga yang dibayarkan, sedangkan bunga yang diterima karena membungakan uang, nilai tambahnya terlihat pada laba.

B. KESENJANGAN EKONOMI SERTA FAKTOR PENYEBABNYA

Terdapat beberapa teori yang dapat menerangkan mengapa terjadi perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi antardaerah. *Pertama* teori basis ekonomi, *kedua* teori lokasi dan *ketiga* teori daya tarik industri.

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi di sektor atau industri di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku dan outputnya di ekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita dan penciptaan peluang kerja di daerah tersebut.

Teori lokasi sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan industri di suatu daerah. Inti pemikiran dari teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha/perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Oleh karena itu, pengusaha akan memilih lokasi usaha yang memaksimalkan keuntungannya dan meminimalisasikan biaya usaha/produksinya, yaitu lokasi yang dekat dengan tempat bahan baku dan pasar.

Dalam teori daya tarik industri, terdapat sejumlah faktor penentu pembangunan industri di suatu daerah, yang terdiri dari faktor-faktor daya tarik industri dan faktor-faktor daya saing daerah. Faktor-faktor daya tarik antara nilai tambah tinggi per pekerja, industri-industri kaitan, daya saing di

masa depan, spesialisasi industri, dan prospek bagi permintaan domestik. Sedangkan faktor-faktor penyumbang pada daya tarik industri adalah faktor pasar, faktor persaingan, faktor keuangan dan ekonomi.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai distribusi pendapatan perseorangan dan distribusi pendapatan fungsional. Distribusi pendapatan perseorangan adalah suatu ukuran yang secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Hal ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu berasal dari gajinya karena bekerja, atau berasal dari sumber yang lain seperti bunga tabungan, laba, hasil sewa, hadiah, ataupun warisan. Selain itu, lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa) juga diabaikan. Jika dua orang individu menerima pendapatan yang sama, maka kedua orang tersebut langsung dimasukkan ke dalam satu kelompok atau satu kategori penghasilan yang sama, tanpa mempersoalkan apakah salah satu diantaranya memperoleh uangnya dari bekerja seharian selama 15 jam sehari sebagai dokter, sementara yang lainnya duduk santai di rumah namun terus mendapatkan bunga dari harta warisan yang didepositokan. (Todaro & Smith, 2006)¹

Oleh karena itu, dalam mengukur kesenjangan dapat dilakukan dengan cara mengurutkan semua individu tersebut berdasarkan pendapatan yang diterimanya, lantas membaginya dengan total populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran.

Sementara itu, dalam suatu populasi akan ditemui kelompok sejahtera dan kelompok pra sejahtera (miskin). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah. Terdapat kesan adanya korelasi

¹ Todaro & Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi Edisi kesembilan Jilid 1 (Alih Bahasa oleh Haris Munandar). Jakarta: Erlangga.

positif antara kepadatan penduduk (jumlah penduduk dibagi luas wilayah) dan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Semakin tinggi jumlah penduduk per km² (atau per hektar), semakin sempit ladang untuk bertani atau lokasi untuk membangun pabrik atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, semakin kecil kesempatan kerja dan sumber pendapatan, yang berarti juga semakin besar persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Hipotesis ini bisa benar tentu dengan asumsi bahwa mobilisasi penduduk antardaerah tidak tinggi.

Selain jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan atau sebagai suatu persentase dari jumlah populasi. Badan Pusat Statistik membuat indeks yang disebut Indeks Kemiskinan Manusia yang terdiri dari lima unsur utama, yaitu proporsi dari jumlah populasi yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun, yang buta huruf, yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sarana kesehatan, dan balita kurang gizi.

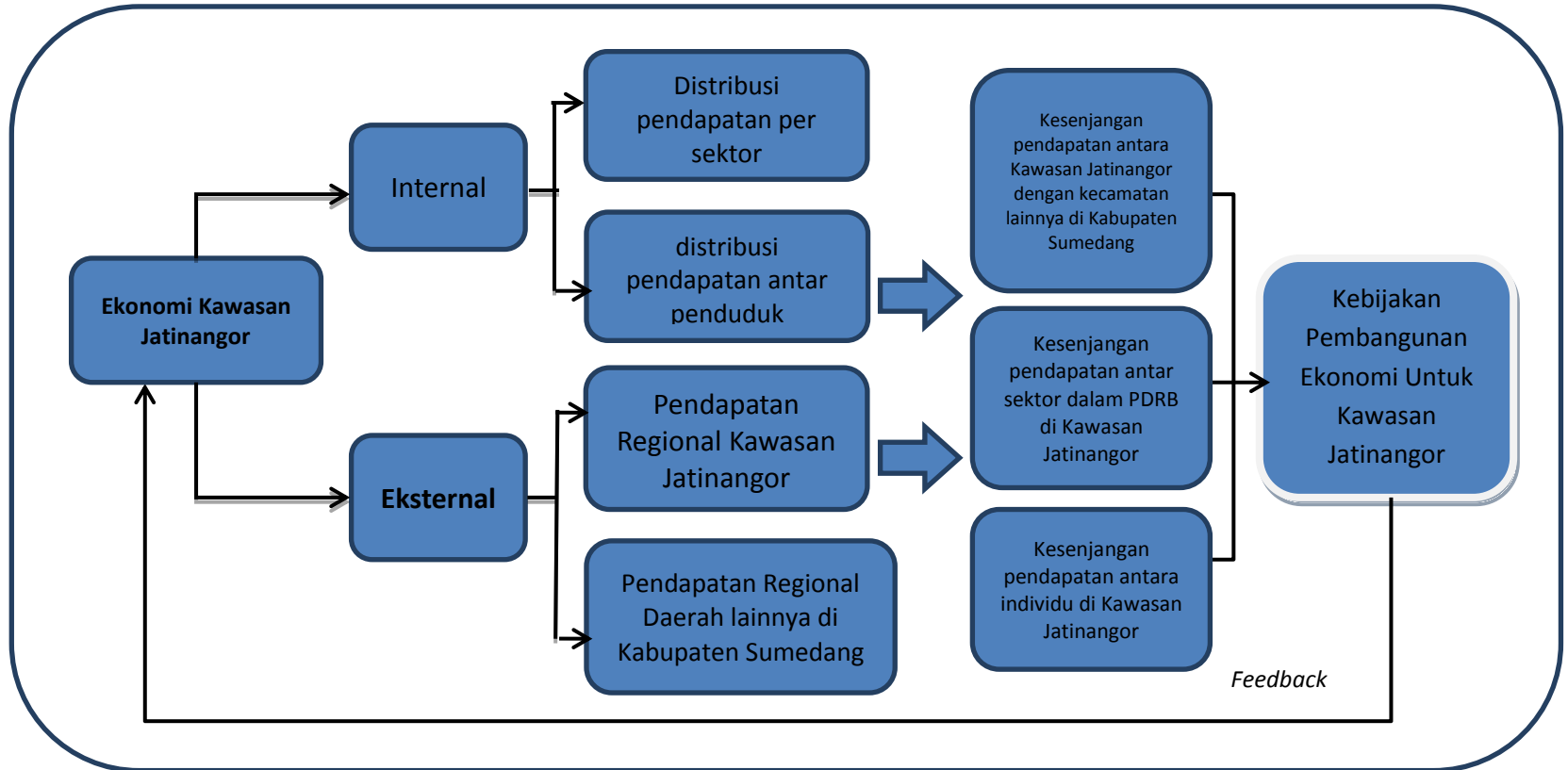
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi antardaerah, diantaranya *pertama* konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, *kedua* alokasi investasi, *ketiga* tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antardaerah, *keempat* perbedaan sumber daya alam antardaerah, *kelima* perbedaan kondisi demografis antarwilayah, dan *keenam* kurang lancarnya perdagangan antardaerah.

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan antardaerah. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Hal ini akan menyebabkan terjadinya dua efek yang saling kontradiksi, yaitu efek penyurutan dan efek penyebaran. Efek penyurutan merupakan efek negatif dari terpusatnya ekonomi di suatu daerah. Efek ini menyebabkan kerugian

yang dialami daerah-daerah di luar pusat perekonomian. Sedangkan, efek penyebaran merupakan efek positif dari terpusatnya ekonomi di suatu daerah. Kegiatan ekonomi yang terpusat di suatu daerah tidak sepenuhnya merugikan semua daerah lainnya, khususnya daerah yang dekat dengan daerah tersebut, atau tidak harus memperbesar efek-efek polarisasi. Paling tidak, pembangunan ekonomi yang terpusat di suatu daerah akan memberikan keuntungan kepada daerah lain. Inilah yang dimaksud sebagai efek “penetasan ke bawah” menurut Hirschman (dalam Tulus Tambunan, 2003).

Faktor kedua yang dapat menyebabkan kesenjangan/kesenjangan adalah alokasi investasi, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN). Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod Domar (dalam Tulus Tambunan, 2003), terdapat korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Teori ini menerangkan bahwa kurangnya tingkat investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah. Hal ini terjadi karena ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur.

C. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 2.2
Kerangka Pikir Kajian

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang teknik penelitian yang digunakan dalam kajian ini. Metode penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu objek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, sumber data, dan metode analisis.

A. OBJEK PENELITIAN

Dalam kajian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Kabupaten Sumedang, dan yang menjadi unit analisis adalah Kawasan Jatinangor. Kawasan Jatinangor yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keseluruhan wilayah Kecamatan Jatinangor yang meliputi 12 desa/kelurahan, yaitu Cipacing, Sayang, Mekargalih, Cinta Mulya, Cisempur, Jatimukti, Jatiroke, Hegarmanah, Cikeruh, Cibeusi, Cileles, dan Cilayung.

Sementara itu, Kabupaten Sumedang sendiri memiliki 26 kecamatan. Selain Jatinangor, 25 kecamatan lainnya adalah Cimanggung, Tanjungsari, Rancakalong, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Situraja, Darmaraja, Wado, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Buahdua, Cibugel, Tanjungmedar, Cisitu, Pamulihan, Ganeas, Jatinunggal, Sukasari, Cisarua, dan Surian.

B. JENIS DATA, SUMBER DATA, TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk melihat kesenjangan yang terjadi diantara Kecamatan Jatinangor dengan daerah lainnya dan kesenjangan antar sektor maupun antar individu di Kecamatan Jatinangor digunakan lima data yang disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1

Data dan Sumber Data yang Digunakan

No.	Data	Nama Dokumen	Sumber
1.	Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang per kecamatan	Profil Daerah Kabupaten Sumedang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
2.	Jumlah penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan di Kecamatan Jatinangor	Profil Daerah Kabupaten Sumedang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
3.	Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Jatinangor	Kecamatan Jatinangor Dalam Angka	Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang
4.	Jumlah PDRB Kabupaten Sumedang per kecamatan	Indikator Ekonomi Makro PDRB Menurut Penggunaan Kabupaten Sumedang Tahun 2008 - 2012	Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
5.	Jumlah PDRB per sektor	Indikator Ekonomi Makro PDRB Menurut Penggunaan Kabupaten Sumedang Tahun 2008 - 2012	Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

Data mengenai jumlah penduduk Kabupaten Sumedang per kecamatan dan jumlah PDRB Kabupaten Sumedang per kecamatan merupakan data panel (*pooled data*) dari 26 daerah kecamatan di Kabupaten Sumedang selama lima tahun (2008 – 2012). Data panel merupakan gabungan data yang terdiri dari data runtut waktu (*time series*) dan data silang tempat (*cross section*).

Kelima data yang digunakan tersebut merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan dari berbagai sumber tersebut.

Selain data sekunder yang disebutkan di atas, digunakan pula data primer. Teknik pengambilan data primer ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Sumedang, yaitu yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.

C. METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode analisis ini dilakukan melalui prosedur statistika maupun bentuk hitungan lainnya. Teknik statistika yang digunakan meliputi teknik statistik deskriptif sederhana seperti *mean* dan perhitungan matematika sederhana.

Untuk melihat kesenjangan antara Kecamatan Jatinangor dan kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang dilakukan dengan menggunakan Metode Klassen. Metode ini digunakan untuk memetakan potensi daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan nilai PDRB dan laju pertumbuhannya. Setelah data diolah, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk menentukan sektor mana yang termasuk kategori unggulan, potensial, berkembang dan terbelakang yang didasarkan pada perhitungan

laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rata-rata nilai kontribusi sektoralnya terhadap PDRB. Keempat kategori tersebut dikenal sebagai Tipologi Klassen dengan kriteria yang tertera pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3.2
Kategori Sektor Berdasarkan Tipologi Klassen

Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektoral	Rata-rata Kontribusi Sektoral terhadap PDRB	$\hat{Y}_{\text{Sektorj}} \geq \hat{Y}_{\text{PDRB}}$	$\hat{Y}_{\text{Sektorj}} < \hat{Y}_{\text{PDRB}}$
	$r_{\text{Sektorj}} \geq r_{\text{PDRB}}$		Sektor Unggulan
$r_{\text{Sektorj}} < r_{\text{PDRB}}$		Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

Sumber: Mahmudi (2010, 54)

Dengan \hat{Y}_{Sektorj} adalah rata-rata PDRB sektor j, \hat{Y}_{PDRB} adalah rata-rata PDRB per sektor, r_{Sektorj} adalah laju pertumbuhan sektor j dan r_{PDRB} adalah laju pertumbuhan PDRB.

Sementara itu, untuk mengetahui kesenjangan antar daerah di Kabupaten Sumedang, dihitung dengan menggunakan Indeks Williamson dengan formula sebagai berikut:

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 x f / N}}{Y}$$

dimana,

Y = pendapatan per kapita Kabupaten Sumedang

Yi = pendapatan per kapita kecamatan

N = jumlah penduduk Kabupaten Sumedang

f = jumlah penduduk kecamatan

Indeks Williamson berkisar antara 0 sampai dengan 1. Kuncoro (2004) membagi Indeks Williamson ke dalam dua kategori yang tertera pada Tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3

Kategorisasi Indeks Williamson

Indeks Williamson	Kategori
0 – 0,5	Kesenjangan (disparitas) rendah
0,51 - 1	Kesenjangan (disparitas) tinggi



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai profil Kawasan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kesenjangan yang terjadi antara Kawasan Jatinangor dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sumedang, serta kesenjangan yang terjadi di dalam Kawasan Jatinangor, yaitu kesenjangan antar penduduk yang ada di Kawasan Jatinangor.

A. PROFIL KAWASAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

Kawasan Jatinangor, dalam penelitian ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang yang berbentuk kecamatan, merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Sumedang. Data yang berasal dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang menyebutkan bahwa pada tahun 2011, jumlah penduduk di kawasan ini sebanyak 110.727 orang. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,6%, jumlah penduduk di kawasan ini meningkat menjadi 113.586. Untuk wilayah seluas 3.160,35 hektar, kepadatan penduduk di Kawasan Jatinangor mencapai 35,04 jiwa per hektar pada tahun 2011 dan 35,94 jiwa per hektar. Dilihat dari sebaran penduduk ini, Kawasan Jatinangor menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat se-Kabupaten Sumedang.

Secara administratif, kecamatan Jatinangor terdiri dari 12 desa, 41 dusun, 138 Rukun Warga (RW) dan 473 Rukun Tetangga (RT). Desa-desa yang terdapat di Jatinangor yaitu Cipacing, Sayang, Mekargalih, Cinta Mulya, Cisempur, Jatimukti, Jatiroke, Hegarmanah, Cikeruh, Cibeusi, Cileles dan Cilayung. Dengan demikian Jatinangor memiliki 12 Kepala Desa dan 64 orang aparat desa.

Ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan penghidupan masyarakat di suatu daerah. Pada umumnya setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikannya akan berusaha untuk mencari pekerjaan. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 mencatat bahwa terdapat 1.510 orang para pencari kerja di Jatinangor yang didominasi oleh para pencari kerja lulusan SMTA. Adapun para pencari kerja tersebut terdiri dari 12 orang lulusan Sekolah Dasar (SD), 66 orang lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP), 953 orang lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), 135 orang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 93 orang lulusan Diploma, 235 orang lulusan Sarjana (S1) dan 7 orang yang memiliki Akta.

Dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi, Jatinangor merupakan kecamatan dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto terbesar di Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2011, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Jatinangor mencapai Rp 1.597.005,65 juta. Dengan pertumbuhan sebesar 10,79% PDRB Jatinangor meningkat hingga mencapai Rp 1.769.334,04 juta. Dengan nilai PDRB seperti itu, Jatinangor berkontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sumedang sebesar 11,80% pada tahun 2011 dan 11,86% pada tahun 2012.

Struktur perekonomian Jatinangor pada kurun waktu 2008 – 2012 tidak banyak mengalami perubahan. Selama lima tahun tersebut, perekonomian Jatinangor didominasi oleh sektor industri pengolahan. Hal ini terjadi karena sektor tersebut yang memberikan kontribusi terbesar bagi

perekonomian kawasan ini. Dalam kurun waktu lima tahun, 2008 – 2012, walaupun memiliki *trend* menurun, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Jatinangor selalu di atas 50%. Rata-rata share yang diberikan oleh sektor ini adalah 52,59%.

Andil terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan rata-rata *share* sebesar 23.30, sektor ini menempati posisi kedua dalam perekonomian Jatinangor. Disusul oleh sektor pertanian dan jasa-jasa yang menempati posisi ketiga dan keempat dalam perekonomian Jatinangor. Rata-rata share yang diberikan kedua sektor ini selama lima tahun masing-masing sebesar 7,46% dan 7,20%. Secara umum, peranan/kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Jatinangor adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1

Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Jatinangor Tahun 2008 – 2012

No.	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Pertanian	7.64	7.50	7.43	7.44	7.28	7.46
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	
3	Industri Pengolahan	53.73	53.58	52.75	51.87	51.03	52.59
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.23	2.16	2.37	2.56	2.78	2.42
5	Bangunan/Konstruksi	1.81	1.86	1.95	1.99	2.02	1.93
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	22.29	22.53	23.21	23.89	24.61	23.30
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.40	1.40	1.41	1.42	1.43	1.41
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.57	3.67	3.69	3.74	3.80	3.69
9	Jasa-jasa	7.33	7.31	7.19	7.09	7.06	7.20

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013

Selanjutnya tingkat kemakmuran masyarakat Jatinangor secara makro dapat dilihat berdasarkan pendapatan per kapita (*percapita income*). Pada tahun 2011 pendapatan per kapita masyarakat Jatinangor adalah sebesar Rp 14.562.647,00 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 16.062.076,00.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Jatinangor tidak sebesar Kecamatan Buahdua, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Situraja, Kecamatan Tomo dan Kecamatan Ujungjaya. Ini terjadi karena jumlah PDRB yang besar harus dibagi dengan jumlah penduduk yang besar pula, Hal ini pula yang menyebabkan PDRB per kapita masyarakat Jatinangor lebih kecil dibandingkan ketujuh kecamatan tersebut. Meskipun demikian, pendapatan per kapita masyarakat Jatinangor tetap lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan masyarakat Kabupaten Sumedang secara keseluruhan.

B. ANALISIS KESENJANGAN ANTARA KECAMATAN JATINANGOR DENGAN KECAMATAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMEDANG

Untuk menganalisis derajat kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari indikator PDRB per kecamatan atau distribusi kecamatan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sumedang.

PDRB kecamatan merupakan jumlah output barang/jasa yang diproduksi pada suatu kecamatan pada waktu tertentu. Data PDRB juga menggambarkan kemampuan kecamatan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Data PDRB kecamatan juga menunjukkan jumlah pendapatan masyarakat di suatu kecamatan. Oleh karena itu, besarnya PDRB yang dihasilkan oleh setiap kecamatan sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut.

Data mengenai jumlah PDRB selama lima tahun (2008 – 2012) menunjukkan bahwa secara umum jumlah PDRB (ADHB maupun ADHK) setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang mengalami *trend* yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dalam rangka produksi barang dan jasa di setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang selalu

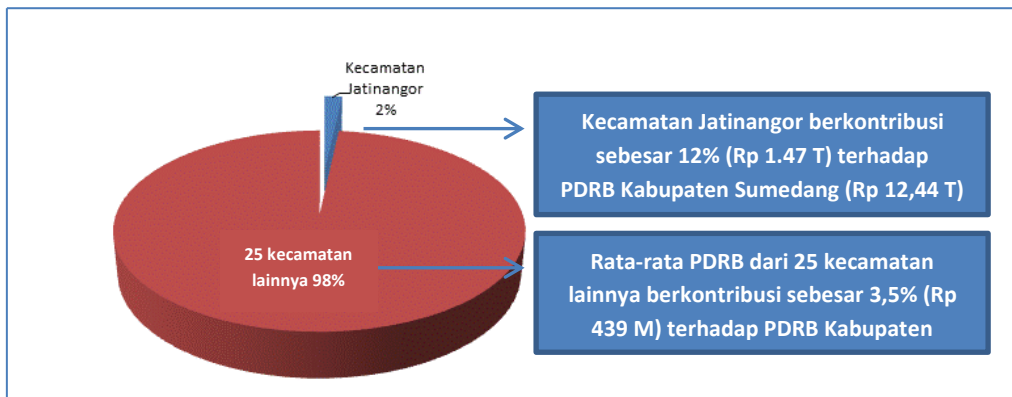
meningkat. Kecamatan yang menghasilkan barang/jasa tertinggi adalah Kecamatan Jatinangor, dengan rata-rata PDRB (ADHB) sebesar Rp 1.465.962,37 juta dan rata-rata PDRB (ADHK) sebesar Rp 695.877,40 juta, sedangkan kecamatan yang menghasilkan barang/jasa terendah adalah Kecamatan Surian, dengan rata-rata PDRB (ADHB) sebesar Rp 71.790,12 juta dan rata-rata PDRB (ADHK) sebesar Rp 30,576,89 juta.

Selain itu, baik PDRB (ADHK) maupun PDRB (ADHB) memperlihatkan bahwa kemajuan perekonomian Kecamatan Jatinangor lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Sumedang Utara, sebagai pusat kegiatan pemerintahan di Kabupaten Sumedang. Hal ini berarti bahwa pusat kegiatan pemerintahan di Kabupaten Sumedang tidak serta merta menjadi pusat kegiatan perekonomian di Kabupaten Sumedang. Tampak bahwa rata-rata PDRB ADHB Kecamatan Sumedang Utara adalah sebesar Rp 1.421.150,65 juta dan rata-rata PDRB ADHK sebesar Rp 646.114,64 juta. Adanya perbedaan jumlah barang/jasa yang diproduksi inilah yang menyebabkan Kecamatan Jatinangor lebih maju dibandingkan dengan Kecamatan Sumedang Utara.

Hal yang lebih menarik untuk dianalisis adalah ketika membandingkan antara PDRB Kecamatan Jatinangor dengan rata-rata PDRB seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang selain Jatinangor. Selama periode penelitian, terlihat jelas ketimpangan (*gap*) yang terjadi antara PDRB Kecamatan Jatinangor dengan daerah lainnya di Kabupaten Sumedang. Rata-rata PDRB (ADHB) seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang selain Kecamatan Jatinangor mencapai Rp 439.043,82 juta dan rata-rata PDRB (ADHK) mencapai Rp 197.451,47 juta. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Jatinangor bergerak sangat cepat dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang. Meskipun demikian, selain Kecamatan Jatinangor, terdapat empat kecamatan yang pertumbuhan ekonominya relatif sama, yaitu Kecamatan Cimanggung,

Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Sumedang Selatan. Kesamaan ini terlihat dari angka PDRB ADHB yang menembus angka satu triliun lebih.

Sementara itu, apabila melihat luas wilayah Kecamatan Jatinangor yang hanya mencapai 2% dari luas wilayah Kabupaten Sumedang, kontribusi Kecamatan Jatinangor terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang mencapai 12%. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Kecamatan Jatinangor mencapai 400% dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang yang hanya mencapai Rp 439.043,82 juta.

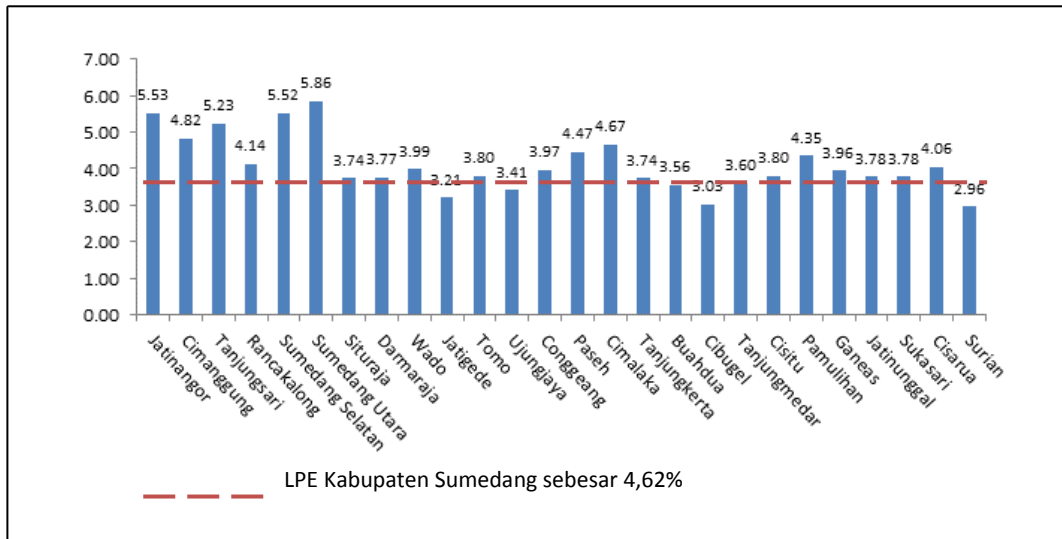


Gambar 4.1

Perbandingan Luas Wilayah dan Kontribusi Kecamatan Jatinangor dengan 25 Kecamatan Lainnya di Kabupaten Sumedang

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Sumedang 2013

Selanjutnya apabila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, selama periode penelitian (2008 – 2012), Kabupaten Sumedang memiliki laju pertumbuhan sebesar 4,62%. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang sedikit berbeda dengan laju pertumbuhan ekonomi di setiap kecamatan. Gambar 4.3 berikut ini memperlihatkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang.



Gambar 4.2

Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Kecamatan di Kabupaten Sumedang Periode 2008 – 2012

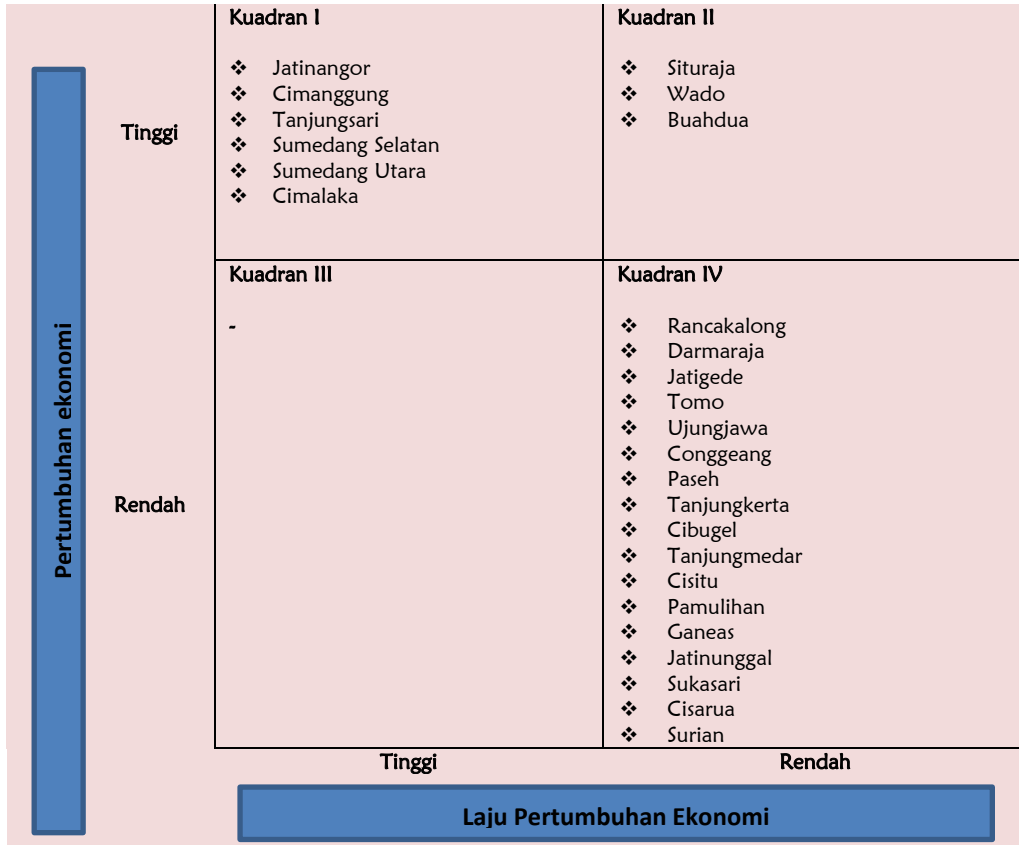
Sumber: diolah dari data PDRB Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Grafik 4.2 di atas, terdapat enam kecamatan dengan panjang batang melebihi garis berwarna merah. Garis berwarna merah tersebut menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Keenam kecamatan yang laju pertumbuhan ekonominya berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang adalah Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Cimalaka. Hal ini berarti bahwa tingkat perekonomian masyarakat di keenam kecamatan tersebut lebih maju apabila dibandingkan dengan tingkat perekonomian di Kabupaten Sumedang. Sementara itu 20 kecamatan lainnya memiliki tingkat perekonomian di bawah tingkat perekonomian Kabupaten Sumedang.

Dengan membandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi setiap kecamatan dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang, kita dapat membagi ke-26 kecamatan tersebut ke dalam empat tipologi. Tipologi pertama adalah kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sumedang, Tipologi kedua adalah kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi namun laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Sumedang, Tipologi ketiga adalah kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi lebih rendah namun laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten, Tipologi keempat adalah kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi lebih rendah dan laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten.

Dengan menggunakan keempat tipologi ini, dapat diketahui tipologi ke-26 kecamatan di Kabupaten Sumedang, sebagai berikut.



Gambar 4.3

Tipologi Kecamatan di Kabupaten Sumedang Periode 2008 – 2012

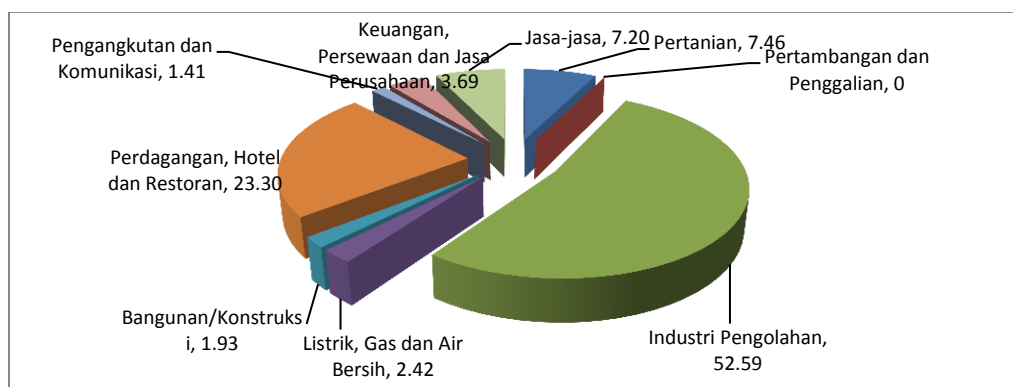
Sumber: diolah dari data PDRB Kabupaten Sumedang

Selain diketahui adanya perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah di Kabupaten Sumedang, kesenjangan antar daerah dapat pula diketahui dari Indeks Williamson. Rata-rata Indeks Williamson selama periode penelitian (2008 – 2012) di Kabupaten Sumedang adalah sebesar 0,39. Menurut Kuncoro (2004), Indeks Williamson sebesar 0,39 tersebut menunjukkan disparitas yang rendah. Hal ini berarti bahwa kesenjangan yang terjadi antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumedang relatif rendah.

C. ANALISIS KESENJANGAN ANTAR SEKTOR LAPANGAN USAHA DI KECAMATAN JATINANGOR

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kecamatan Jatinangor merupakan kecamatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Sumedang. Selama periode penelitian (2008 – 2012), rata-rata pertumbuhan ekonomi kecamatan ini sebesar Rp 1.465.962,37 juta (ADHB) dan Rp 695.877,40 juta (ADHK) serta rata-rata laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,53%.

Tingginya pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Jatinangor terutama berasal dari sektor industri pengolahan. Selama periode penelitian, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 52,59% terhadap PDRB Kecamatan Jatinangor. Kontributor kedua terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sedangkan sektor pertanian menjadi kontributor ketiga terhadap PDRB Kecamatan Jatinangor. Besarnya kontribusi kedua sektor ini selama periode penelitian masing-masing sebesar 23,30% dan 7,46%. Gambar 4.4 berikut ini menunjukkan *share* setiap sektor lapangan kerja terhadap PDRB Kecamatan Jatinangor.



Gambar 4.4

Rata-rata Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Jatinangor Tahun 2008 – 2012

Sumber: diolah dari data PDRB Kecamatan Jatinangor

Dua tabel berikut ini (Tabel 4.2 dan Tabel 4.3) menunjukkan kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kecamatan Jatinangor berdasarkan ADHB dan ADHK.

Tabel 4.2

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Berdasarkan Sektor Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Jatinangor Tahun 2008 – 2012 (Juta Rupiah)

	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Pertanian	91,929.87	98,414.61	107,530.19	118,795.84	128,836.99	109,101.50
2	Pertambangan dan Penggalian						
3	Industri Pengolahan	646,884.80	703,203.27	763,365.50	828,326.22	902,819.52	768,919.86
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	26,838.16	28,378.38	34,271.04	40,952.10	49,226.25	35,933.19
5	Bangunan/Konstruksi	21,803.52	24,371.32	28,198.58	31,812.69	35,723.49	28,381.92
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	268,336.89	295,641.37	335,936.30	381,495.97	435,362.70	343,354.65
7	Pengangkutan dan Komunikasi	16,863.93	18,375.07	20,336.37	22,626.61	25,293.90	20,699.18
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	43,001.56	48,106.24	53,463.56	59,696.92	67,193.71	54,292.40
9	Jasa-jasa	88,236.01	95,944.77	104,040.81	113,299.33	124,877.50	105,279.68
	TOTAL	1,203,894.74	1,312,435.03	1,447,142.35	1,597,005.68	1,769,334.06	1,465,962.37

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2013

Tabel 4.3

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 (ADHK) Berdasarkan Sektor Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Jatinangor Tahun 2008 – 2012 (Juta Rupiah)

	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Pertanian	39,573.72	40,975.44	40,653.53	40,613.88	40,480.10	40,459.33
2	Pertambangan dan Penggalian						
3	Industri Pengolahan	347,402.09	363,384.52	380,598.72	400,654.18	419,464.94	382,300.89
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	13,150.42	13,741.96	15,230.45	16,630.42	18,239.93	15,398.64
5	Bangunan/Konstruksi	12,820.02	14,103.28	15,851.25	17,400.73	18,822.88	15,799.63
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	132,002.14	140,424.04	150,439.91	162,977.24	175,752.94	152,319.25
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7,060.45	7,695.47	8,191.26	8,826.58	9,558.95	8,266.54
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	23,907.80	25,658.69	6,145.81	29,437.11	31,985.50	23,426.98
9	Jasa-jasa	48,289.24	50,612.39	27,419.29	56,337.01	59,814.27	48,494.44
	TOTAL	624,205.88	656,595.79	53,204.26	732,877.15	774,119.51	568,200.52

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2013

Apabila kesembilan sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian di Kecamatan Jatinangor dikelompokkan menjadi sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, maka akan diperoleh PDRB masing-masing sektor seperti yang tercantum pada Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4

Distribusi PDRB Kecamatan Jatinangor Menurut Sektor Lapangan Usaha Berdasarkan ADHB dan ADHK Tahun 2008 – 2012

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku				
Tahun	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tersier	TOTAL
2008	91.929,87	695.526,48	416.438,39	1.203.894,74
2009	98.414,61	755.952,97	458.067,45	1.312.435,03
2010	107.530,19	825.835,12	513.777,04	1.447.142,35
2011	118.795,84	901.091,01	577.118,83	1.597.005,68
2012	128.836,99	987.769,26	652.727,81	1.769.334,06
Rata-rata	109.101,50	833.234,97	523.625,90	1.465.962,37
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2000)				
Sektor	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tersier	TOTAL
2008	39.573,72	373.372,53	211.259,63	624.205,88
2009	40.975,44	391.229,76	224.390,59	656.595,79
2010	40.653,53	411.680,42	192.196,27	644.530,22
2011	40.613,88	434.685,33	257.577,94	732.877,15
2012	40.480,10	456.527,75	277.111,66	774.119,51
Rata-rata	40.459,33	413.499,15	232.507,22	686.465,71

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2013

Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha, pada tahun 2012 penduduk di Kecamatan Jatinangor terbagi ke dalam enam kelompok, yaitu petani/buruh tani, pedagang, buruh/karyawan, PNS/TNI/Polri, wiraswasta, dan kelompok lainnya. Kelompok lainnya merupakan penduduk yang tidak bekerja, mengurus rumah tangga, pelajar mahasiswa dan pensiunan. Tabel 4.5 berikut

menunjukkan pengelompokan penduduk di Kecamatan Jatinangor pada tahun 2012 berdasarkan kelompok usaha.

Tabel 4.5

Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Jatinangor Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2012

No.	Lapangan Usaha	Jumlah	Persentase
1.	Petani/Buruh Tani	2.803	8.58
2.	Pedagang	3.650	11.18
3.	Buruh/Karyawan	11.823	36.20
4.	PNS/TNI/Polri	2.378	7.28
5.	Wiraswasta	12.003	36.75

Sumber: diolah dari Profil Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data pada Tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa proporsi terbesar tenaga kerja di Kecamatan Jatinangor berasal dari lapangan usaha (mata pencaharian) sebagai wiraswasta dan buruh/karyawan, yaitu masing-masing mencapai 36,75% dan 36,20. Selanjutnya, proporsi ketiga terbesar tenaga kerja adalah sebagai pedagang. Pada tahun 2012 ini, jumlah pedagang di Kecamatan Jatinangor mencapai 11,18%. Sedangkan, tenaga kerja yang memiliki proporsi terendah di kecamatan ini adalah sebagai petani/buruh tani dan PNS/TNI/Polri. Kedua lapangan usaha ini masing-masing memiliki proporsi sebesar 8,78% dan 7,28%.

Kelima bidang mata pencaharian tersebut selanjutnya dapat dikelompokkan kembali menjadi tiga sektor lapangan usaha utama, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer terdiri dari petani/buruh tani, sektor sekunder terdiri dari buruh/karyawan, dan sektor tersier terdiri dari pedagang, wiraswasta, dan PNS/TNI/Polri. Proporsi masing-masing sektor tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6

Proporsi Tenaga Kerja di Kecamatan Jatinangor Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Tahun 2012

No.	Sektor	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sektor Primer	2.803	8,58
2.	Sektor Sekunder	11.823	36,20
3.	Sektor Tersier	18.031	55,21

Sumber: diolah dari Profil Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data pada Tabel 4.6 di atas, pada tahun 2012 sektor tersier merupakan sektor terbesar yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Sumedang, yaitu hingga mencapai 55,21%. Sektor sekunder menjadi sektor kedua terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2012, sektor sekunder ini berkontribusi sebesar 36,20% terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, sektor primer menjadi sektor terendah dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014, sektor ini hanya menyumbang 8,58% terhadap penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Jatinangor.

Apabila dilihat berdasarkan pendapatan per sektor, pada tahun 2012, sektor sekunder menempati posisi pertama sebagai sektor yang memiliki pendapatan terbesar di Kecamatan Jatinangor, yaitu mencapai Rp 987.769,26 juta. Sementara itu sektor tersier dan sektor primer masing-masing berada pada posisi kedua dan ketiga setelah sektor sekunder. Nilai yang dicapai oleh kedua sektor tersebut pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 652.727,81 juta dan 128.836,99 juta. Namun, apabila dilihat berdasarkan produktivitas setiap sektor, yaitu rasio antara pendapatan per sektor dengan banyaknya tenaga kerja pada sektor tersebut, pada tahun 2012 sektor sekunder juga memiliki produktivitas tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu mencapai Rp 83.546.414,62 per tenaga kerja per tahun, atau

sekitar Rp 6.962.201,22 per tenaga kerja per bulan. Produktivitas di sektor primer mencapai Rp 45.963.963,61 per tenaga kerja per tahun, atau sebesar Rp 3.830.330,30 per tenaga kerja per bulan. Sementara itu, produktivitas di sektor tersier mencapai Rp 36.200.311,13 per tenaga kerja per tahun, atau mencapai Rp 3.016.692,59 per tenaga kerja per bulan.

Untuk memperoleh pendapatan perkapita dari setiap sektor lapangan usaha di Kecamatan Jatinangor, dapat dilakukan dengan membandingkan pendapatan di setiap sektor dengan jumlah penduduk pada sektor tersebut. Jumlah penduduk di setiap sektordiperoleh dengan cara menambahkan jumlah tenaga kerja per sektor dengan jumlah penduduk yang menjadi tanggungan di setiap sektor. Dengan asumsi bahwa *dependency ratio* sama untuk setiap sektor lapangan usaha di Kecamatan Jatinangor, yaitu sebesar 45% (untuk setiap 100 orang berusia kerja (usia yang dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum roduktif dan dianggap tidak roduktif lagi) maka jumlah penduduk dan pendapatan per kapita di setiap sektor lapangan usaha disajikan pada Tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7

Jumlah Penduduk dan Pendapatan per Kapita di Kecamatan Jatinangor Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Tahun 2012

No.	Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk	Pendapatan per Kapita
1.	Sektor Primer	8.414	15.311.319,01
2.	Sektor Sekunder	35.492	27.830.624,39
3.	Sektor Tersier	54.128	12.058.892,85

Sumber: diolah dari Profil Kabupaten Sumedang

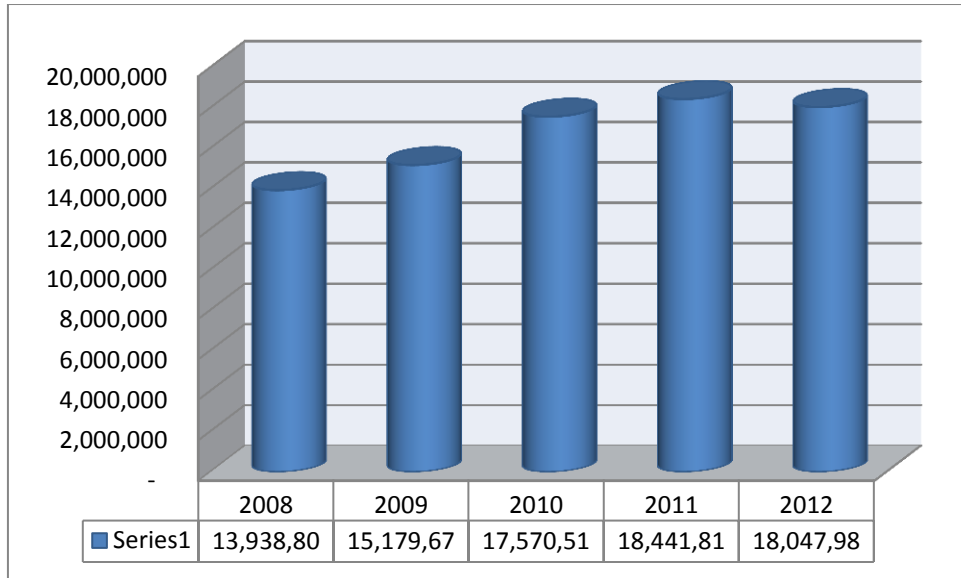
Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa penduduk dengan lapangan usaha di sektor sekuder memiliki pendapatan per kapita yang lebih

tinggi dibandingkan dengan penduduk dari sektor primer dan tersier. Hal ini terjadi karena produktivitas per tahun di sektor sekunder hampir mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan produktivitas per tahun di sektor primer, atau hampir mencapai tiga kali lipat dibandingkan dengan produktivitas per tahun di sektor tersier. Kesenjangan pendapatan yang terjadi antara sektor sekunder dengan sektor tersier adalah sebesar Rp 15.771.731,54 per tahun atau sebesar Rp 1.314.310,96 per bulan.

D. ANALISIS KESENJANGAN ANTAR INDIVIDU DI KECAMATAN JATINANGOR

Seperti yang disampaikan oleh Samirin (2014, 25) bahwa PDRB adalah kue total, sedangkan PDRB per kapita merupakan ukuran kue per penduduk. PDRB per kapita memberikan gambaran yang lebih valid mengenai kemakmuran penduduk. Samirin menyebutkan bahwa PDRB per kapita tidak menggambarkan rata-rata pendapatan tiap penduduk, melainkan potensi pendapatan saja. Hal ini dikarenakan tidak semua PDRB menjadi hak penduduk di daerah tersebut. Ada bagian yang menjadi hak pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, sebagian menjadi hak perusahaan asing yang beroperasi di daerah tersebut, atau para penanam modal yang mengharapkan pengembalian investasi, sehingga pendapatan rumah tangga per kapita selalu jauh lebih rendah dari PDRB per kapita.

Selain PDRB, untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di Kecamatan Jatinangor, dapat dilihat dari PDRB per kapita. Gambar 4.5 berikut ini menunjukkan potensi pendapatan per kapita penduduk di Kecamatan Jatinangor.



Gambar 4.5

Pendapatan per Kapita Penduduk di Kecamatan Jatiningor (Rupiah/Tahun)

Sumber: diolah dari Profil Kabupaten Sumedang

Selama periode penelitian (2008 – 2012), pendapatan per kapita penduduk Kecamatan Jatiningor cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai rata-rata Rp 16.635.758,42 per tahun (Rp 1.386.313,20 per bulan). Angka ini tentu saja hanya menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk di Kecamatan Jatiningor, karena terdapat penduduk yang memiliki pendapatan yang lebih rendah dari nilai tersebut, dan terdapat penduduk yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari nilai tersebut.

Data pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di Kecamatan Jatiningor terdapat sebanyak 21.332 orang yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu penduduk dengan penghasilan di bawah Rp 2.891.340,00 per tahun (Rp 240.945,00 per bulan)¹. Apabila menggunakan angka ini sebagai rata-rata pendapatan penduduk pra sejahtera, maka akan diperoleh PDRB penduduk pra sejahtera sebesar Rp 61.678.064.880,00.

¹ Garis Kemiskinan berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS)

Jumlah PDRB penduduk pra sejahtera di Kecamatan Jatinangor ini sama dengan 3,5% dari PDRB Kecamatan Jatinangornya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa 3,5% pendapatan Kecamatan Jatinangor dinikmati oleh sebanyak 22% penduduk Kecamatan Jatinangor.

Sementara itu, jumlah penduduk yang tergolong ke dalam penduduk sejahtera pada tahun 2012 adalah sebanyak 76.703 orang. Dengan total PDRB sebesar Rp 1.769.334.050.000,00 maka akan diperoleh PDRB penduduk sejahtera sebesar 1.707.655.985.120,00. Pendapatan per kapita penduduk sejahtera di Kecamatan Jatinangor sebesar Rp 22.263.223,00 per tahun atau sebesar Rp 1.855.268,57 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa 96,5% pendapatan Kecamatan Jatinangor dinikmati oleh sebanyak 78% penduduk Kecamatan Jatinangor.

Berdasarkan asumsi di atas, maka kesenjangan (gap) yang terjadi antara penduduk pra sejahtera dan penduduk sejahtera di Kecamatan Jatinangor sebesar Rp 19.371.882,89 per tahun atau sebesar Rp. 1.614.323,57 per bulan. Ketimpangan pendapatan yang diperoleh ini belum mencerminkan ketimpangan pendapatan yang sebenarnya terjadi di Kecamatan Jatinangor. Untuk mendapatkan angka ketimpangan pendapatan yang riil, harus dilakukan survey terhadap seluruh penduduk di Kecamatan Jatinangor.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Dilihat dari jumlah PDRB di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang pada periode 2008 - 2012, dengan menggunakan Tipologi Klassen, diketahui bahwa Jatinangor merupakan satu dari enam kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Jatinangor. Sementara itu, terdapat 17 kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah di Kabupaten Sumedang. Kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi yang paling rendah di Kabupaten Sumedang adalah Kecamatan Surian. Meskipun Indeks Williamson di Kabupaten Sumedang hanya sebesar 0,39, akan tetapi pendapatan daerah Kecamatan Jatinangor mencapai 21 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan daerah Kecamatan Surian pada tahun 2012.
- Dengan membagi jenis lapangan usaha DI Kecamatan Jatinangor ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, diperoleh bahwa pendapatan per kapita di sektor

primer adalah sebesar Rp 15.311.319,01 per tahun, pendapatan per kapita di sektor sekunder adalah sebesar Rp 27.830.624,39 per tahun, dan pendapatan per kapita di sektor tersier adalah sebesar Rp 12.058.892,85 per tahun. Besarnya kesenjangan yang terjadi antar sektor yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi dengan sektor yang memiliki pendapatan per kapita terendah di Kecamatan Jatinangor adalah sebesar Rp 15.771.731,54 per tahun atau sebesar Rp 1.314.310,96 per bulan.

- Dengan membagi penduduk di Kecamatan Jatinangor ke dalam kelompok sejahtera dan kelompok pra sejahtera, rata-rata pendapatan penduduk yang berada di kelompok sejahtera sebesar Rp 22.263.223,00 per tahun (Rp 1.855.268,57 per bulan) dan rata-rata pendapatan penduduk yang berada di kelompok pra sejahtera sebesar Rp 2.891.340,00 per tahun (Rp 240.945,00 per bulan). Besarnya kesenjangan pendapatan yang terjadi antar individu, yaitu antara kelompok penduduk pra sejahtera dan kelompok penduduk sejahtera di Kecamatan Jatinangor adalah sebesar Rp 19.371.882,89 per tahun atau sebesar Rp 1.614.323,57 per bulan.
- Pembangunan ekonomi di Jatinangor selain telah menciptakan pertumbuhan, tetapi telah memunculkan permasalahan baru yaitu makin meningkatnya kesenjangan dengan kecamatan lain, kesenjangan antar sektor dan kesenjangan antar penduduk di kawasan Jatinangor. Apabila hal ini dibiarkan, tanpa ada kebijakan strategis untuk mengerem kesenjangan tersebut, dikhawatirkan ke depan akan memunculkan kecemburuan ekonomi yang pada akhirnya berujung pada masalah sosial yang kontra produktif terhadap pembangunan itu sendiri.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang ada, baik antara Kecamatan Jatinangor dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sumedang, ataupun antar sektor lapangan usaha dan antar individu di Kecamatan Jatinangor, peran aktif dari Pemerintah Kabupaten Sumedang sangat dibutuhkan, terutama untuk mengatasi kesenjangan antar sektor dan antar individu di kawasan jatinangor.
- Kesenjangan yang terjadi antara sektor dan antar individu di Kecamatan Jatinangor dapat diperkecil/dipersempit melalui keberpihakan Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada kelompok-kelompok yang rentan akan kemiskinan, yaitu penduduk pada sektor primer dan sektor tersier. Keberpihakan tersebut dapat dilakukan dengan cara membatasi penguasaan asset dan ijin berusaha bagi penduduk di luar Jatinangor.
- Selain itu, agar pendapatan per kapita penduduk Kecamatan Jatinangor di sector pimer dan tersier meningkat, Pemerintah Kabupaten Sumedang pun harus lebih memberdayakan penduduk asli Kecamatan Jatinangor, misalnya dengan memberikan pelatihan dan keterampilan kerja, serta program pemagangan di perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Sumedang.
- Kesenjangan pendapatan antar sektor di Kecamatan Jatinangor yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari selisih antara pendapatan penduduk di sektor yang tertinggi dengan sektor yang terendah, dalam penelitian ini yaitu antara sektor sekunder dengan sektor tersier. Namun, dikarenakan jumlah penduduk pada setiap sektor yang digunakan menggunakan asumsi bahwa setiap tenaga kerja di setiap sektor mempunyai tanggungan yang sama, maka

kesenjangan antar sektor yang terjadi belum mencerminkan kesenjangan antar sektor yang sebenarnya. Untuk mendapatkan angka kesenjangan pendapatan antar sektor yang sebenarnya (riil), harus dilakukan survey terhadap lapangan usaha seluruh penduduk di Kecamatan Jatinangor.

- Angka kesenjangan pendapatan antar individu di Kecamatan Jatinangor yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari selisih antara pendapatan penduduk sejahtera dengan pendapatan penduduk pra sejahtera yang diperoleh dari masing-masing PDRB nya. Untuk mendapatkan angka ketimpangan pendapatan yang sebenarnya (riil), harus dilakukan survey terhadap pendapatan seluruh penduduk di Kecamatan Jatinangor.

DAFTAR PUSTAKA

- Chiang, A.C & Wainwright, K. 2006. *Dasar-dasar Matematika Ekonomi*. Terjemahan Sudigno & Nartanto. Jakarta: Erlangga.
- Dornbusch, R., Fischer, S. & Startz, R. 2008. *Makroekonomi*. Terjemahan Roy Indra Mirazudin. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Gujarati, D.N. 2003, *Basic Econometrics*, 4th edition, New York: McGraw-hill Companies, Inc.
- Hoy, M. et al. 2000. *Mathematics for Economics 2nd Edition*. Cambridge: MIT Press.
- Insukindro. 1994. *Reformasi Perpajakan, Keseimbangan Intern dan Distribusi Pendapatan (Makalah Seminar Reformasi erpajakan II: Substansi, Urgensi dan Prospek, PAU Studi Ekonomi UGM)*.
- Insukindro, Makhfatih, A & Sugiyanto, C. 1994. *Pengaruh Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 1970-1994*. Yogyakarta : Program Studi MEP, Universitas Gajah Mada.
- Jhingan, M.L. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mangkoesebroto, G. 1994. *Ekonomi Publik* . Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Mankiw. 2005. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.

- Romer, D. 2009. *Advance Macroeconomics*. New York: Mc Graw Hill International.
- Rosen, HS. 2005. *Public Finance Seventh edition*. New York: Mc Graw Hill International.
- Sagir, S. 2011. *Ekonomi Berpihak kepada Rakyat (Pro Poor, Pro Job, Pro Growth)*. Bandung: AIPI.
- Samirin, W. 2014. *Bridging The Gap (Mengurangi Ketimpangan, Meluruskan Esensi Pembangunan)*. Jakarta: Gramedia.
- Todaro, MP & Smith, SC. 2006. *Economic Development, Ninth Edition*. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Van den Berg, H. 2001. *Economic Growth and Development*. New York: Mc Graw Hill.
- Wijaya, B & Atmanti, H. *Analisis Pengembangan Wilayah dan Sektor Potensial Guna Mendorong Pembangunan di Kota Salatiga* (diterbitkan dalam Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 3 No. 2/ Desember 2006: 101 – 118)



**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
WEB SITE : www.bandung.lan.go.id**